

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**OLEH:**

**HASTINE ATAS ASIH  
1420112031**

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH**
- 2. Dr. Yuslim, SH., MH**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

# **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

(Hastine Atas Asih,1420112031,Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas,2018)

## **ABSTRAK**

Masalah perparkiran di Kota Bukittinggi sudah menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, baik masyarakatnya maupun pengunjungnya. Hal yang sering dikeluhkan diantaranya adalah banyaknya oknum yang mengadakan titik parkir baru di tempat yang tidak diatur di dalam Perwako sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas, adanya beberapa oknum juru parkir tidak menyerahkan karcis kepada pengguna parkir, dan seringnya juru parkir meminta bayaran lebih dari jumlah yang telah ditetapkan kepada si pengguna parkir. Dari berbagai permasalahan tersebut peran DPRD dalam pengawasan tentu tidak sedikit yang mempertanyakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi keberadaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi pada era sekarang ini, kesempatan daerah untuk menggali potensi menjadi lebih luas sehingga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menumbuhkembangkan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangatlah diperlukan dalam rangka mengurangi resiko berbagai penyelewengan. Penulisan ini hendak meneliti bagaimana pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selama ini, belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda yang telah diadukan. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang selama ini dilakukan, Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi belum memiliki dasar hukum yang jelas. Selama ini pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif yaitu bahwa DPRD telah mulai melakukan pengkajian Ranperda sebelum menjadi Perda. Pengkajian ini dilakukan guna menghindari ketidaksesuaian kebijakan substansi Ranperda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan represif dengan cara langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyampaikan rekomendasi pada saat pelaksanaan paripurna.

**Kata kunci : Pengawasan DPRD, Peraturan Daerah, Retribusi**

**Supervision of the Regional People's Legislative Assembly on the  
Implementation of Bukittinggi City Local Regulations on Parking Service  
Levies on the Public Road**

(Hastine Atas Asih, 1420112031, Faculty of Law of Graduate Program  
Andalas University, 2018)

**ABSTRACT**

**Parking problem in Bukittinggi City has become an essential topic both from the people dan visitors.** There are many people who take new parking points that are not regulated in Perwako is often complained which has an impact on traffic congestion. Beside that, there are also parking attendants often ask charge more than the amount has been assigned to the parking user. From the problems above, the function of the DPRD in supervision, of course it is asked by many people. Supervision is one of existence functions of DPRD. Moreover, in this present era, the opportunity of regional area in exploring its potential becomes wider and as a result it can be more creative an innovative in developing the spirit of regional autonomy. Therefore, the role of legislative oversight of the executive is an important thing in order to reduce the risk of misconduct. This writing would like to examine how the implementation of the supervision of Regional people's legislative assembly on the Regional Regulation of Bukittinggi City Number 4 of 2011 Concerning Parking Service Levy on the Public Road Edge. So far, there is no clear rules about the mechanism pof DPRD's implementation of the supervision that has been carried out, the supervision of the regional people's representative council on the implementation of public road parking service levy in Bukittinggi doesn't have a clear legal basis. During this time, the supervision was preventive an repressive. Preventive supervision means DPRD has begun to review Ranperda policy which is contrary to the higher laws and the public interest. In addition, DPRD also do repressive oversight by coordinating with the transportation office in Bukittinggi as a related agency directly. It is done to follow up every report from the public. Beside that, DPRD also report the recommendation during the plenary session.

**Keywords: DPRD Supervision, Regional Regulation, Retribution**